

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan pendidikan yang bebas dari korupsi merupakan salah satu wujud pelayanan yang bermutu dan murah bagi masyarakat sebagai pelanggan pendidikan, khususnya siswa dan orang tua siswa. Kebermutuan pelayanan pendidikan erat kaitannya dengan kecukupan dana dan sumber daya yang disiapkan sekolah. Korupsi akan mengakibatkan berkurangnya sumber daya yang diorientasikan untuk suatu kegiatan pendidikan di sekolah akibatnya terjadi hambatan dalam mencapai tujuan sekolah yang bermutu.

Ade Irawan dkk. (2001:106) menyebutkan bahwa mahal biaya sekolah sangat erat kaitannya dengan perilaku korupsi pelaksana pendidikan di sekolah, maupun birokrasi di atasnya. Korupsi dalam penyelenggaraan pendidikan persekolahan mengakibatkan minimnya atau bahkan hilangnya dana yang seharusnya digunakan untuk membiayai layanan pembelajaran. Hal inilah yang menyebabkan masyarakat harus membayar lebih jasa pendidikan dengan kualitas minimal.

Korupsi di sekolah, bukan saja diakibatkan oleh penyalahgunaan finansial secara tidak bertanggungjawab tetapi, diakibatkan oleh lemahnya sistem manajemen sekolah yang dikaitkan dengan lemahnya sumber daya yang mengelola sekolah dan inilah yang menjadi fokus korupsi di sekolah

untuk mengeliminir persoalan tersebut sekolah harus mengimplementasikan transparansi, partisipasi dan akuntabilitas manajemen sekolah.

Permasalahan di atas lebih kompleks apabila dikaitkan dengan kondisi yang sedang dialami oleh bangsa ini, dimana aset-aset dan infrastruktur pendidikan saat ini harus dibangun ulang, seperti bangunan yang rusak dan guru yang akan pensiun. Tentu saja dua hal tersebut akan menyedot dana investasi pendidikan, sehingga orientasi peningkatan mutu pendidikan akan menjadi semakin sulit untuk dicapai. Kondisi di atas sesuai dengan analisis yang dilakukan oleh *World Bank* (2007:5):

Saat ini Indonesia mengalokasikan sebanyak 17,2 persen dari total pengeluaran publik untuk pendidikan (2006). Tingkat ini hampir sama dengan negara berkembang lainnya, dan bahkan sama pula dengan negara-negara OECD akan tetapi, beberapa negara tetangga terdekat (Malaysia, Thailand dan Filipina) mengalokasikan dana lebih banyak untuk sektor pendidikan mereka—sampai dengan 28 persen dari anggaran nasional mereka. Disamping itu, masih diperlukan lagi anggaran untuk investasi tambahan mengingat gedung sekolah dan aset pendidikan lainnya telah mengalami kerusakan yang sangat parah selama beberapa tahun belakangan ini.

Lebih jauh mengenai kondisi yang terjadi saat ini pada sekolah-sekolah, khususnya sekolah-sekolah yang mendapat bantuan dari pemerintah atau lembaga lainnya, seperti bantuan BOS, *school grant*, rehab ruang kelas, pembangunan ruang kelas baru atau ruang perpustakaan, dan berbagai bantuan keuangan lainnya, disinyalir masih memungkinkan pengelolaan pembiayaan yang belum sesuai dengan ketentuan, mungkin saja penyelewengan dana bantuan dianggap sebagai suatu hal yang lazim

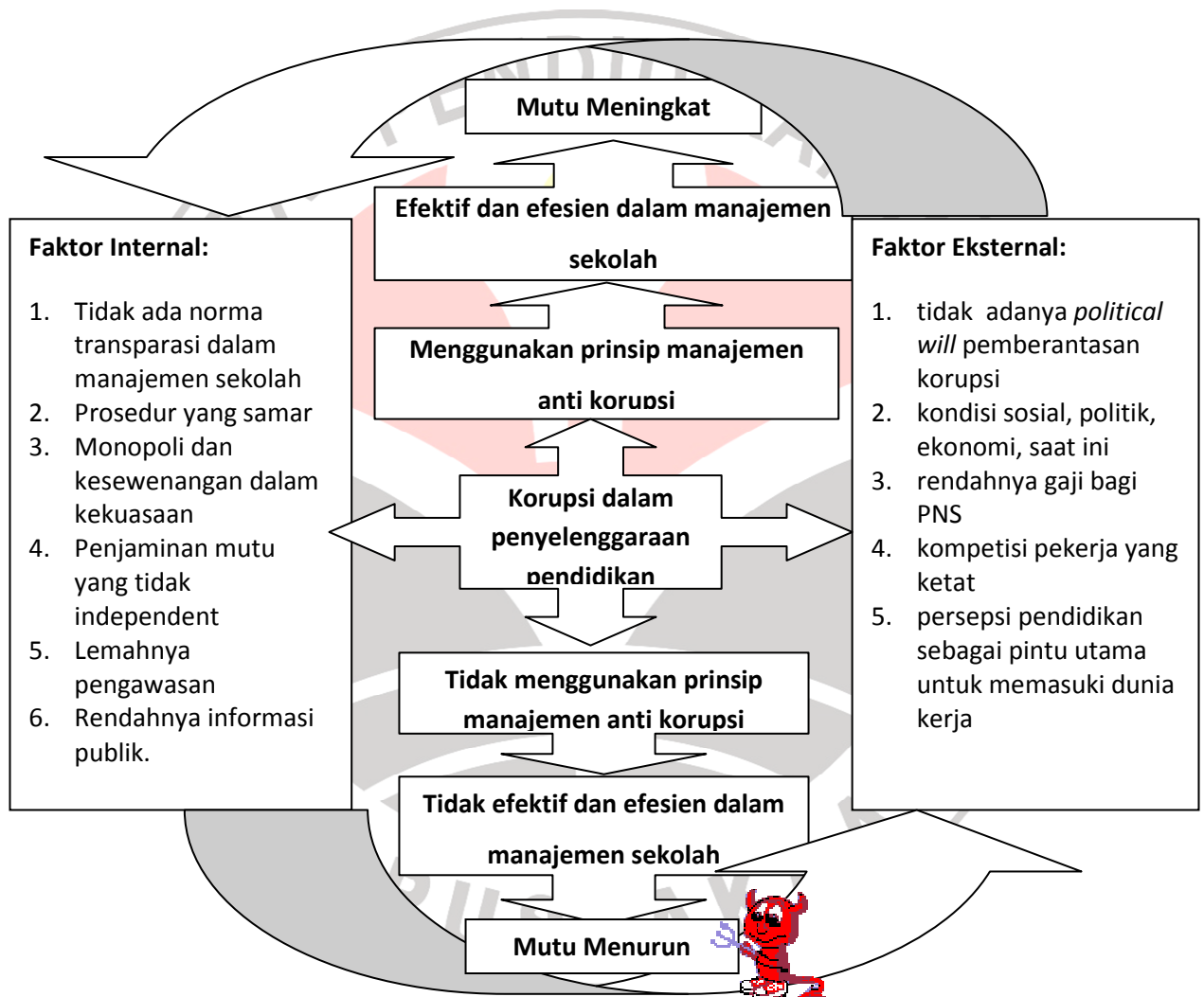
terjadi, baik oleh para oknum guru, oknum kepala sekolah, oknum pengurus komite sekolah, oknum dinas pendidikan.

Fenomena yang telah diungkap dan dipublikasikan menunjukkan masih banyak dan semakin banyaknya praktek korupsi di dunia persekolahan sampai saat ini. Korupsi dana pendidikan, menurut catatan Ade Irawan (2003:25) tidak saja pada dana pemerintah tetapi juga dana yang langsung ditarik dari masyarakat. Bila aparat birokrasi selama ini mengeluhkan dana pendidikan yang kecil, ternyata dana yang kecil itu dikorup pula.

Ade (2003:25) mengemukakan, banyak sekolah di Jakarta dan Jawa Barat tidak memasukan komponen dana pemerintah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah. Sebuah SD favorit di Jakarta menerima dana *Block Grant* Rp.55 juta yang menjadi komponen tetap pembiayaan sekolah, tetapi tidak mencantumkan dalam RAPBS.

Salah satu isu publik yang muncul belakangan ini adalah korelasi antara Korupsi dan Pendidikan. Ada yang sementara orang yang mengatakan signifikan dan ada yang mengatakan tidak signifikan, semua pendapat adalah hipotesa, yang tetap diperdebatkan berdasarkan argumentasi masing-masing. Perdebatan bisa saja berkepanjangan tanpa kata akhir, sampai salah satu pihak dapat menarik kesimpulan yang didukung oleh hasil penelitian lapangan yang valid dan *reliabel*, berdasarkan data primer dan sekunder serta metodologi yang memenuhi syarat normatif yang berlaku umum dan universal. Tindakan korupsi

dalam penyelenggaraan pendidikan saat ini bukan semata-mata kondisi yang kebetulan, tetapi turut dipengaruhi oleh banyak faktor baik itu internal ataupun eksternal. Apabila diklasifikasikan, faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:



Gambar 1.1 Faktor-faktor korupsi dalam penyelenggaraan pendidikan

Tentu saja temuan diatas bukanlah sesuatu yang menggembarakan bagi dunia pendidikan, terlebih apabila pendidikan diposisikan sebagai upaya

untuk meningkatkan kualitas sumber daya dalam membangun generasi yang lebih baik. Untuk itu pemikiran dan kajian harus serius dilakukan secara lebih sistematis untuk mengatasi masalah ini. Skripsi ini pada hakikatnya mencoba mencari akar permasalahan dari masalah korupsi yang terjadi dalam penyelenggaraan pendidikan, kemudian penulis mencoba memecahkan masalah korupsi dalam penyelenggaraan pendidikan tersebut dengan mengambil judul “ Pengaruh Manajemen Anti-Korupsi Terhadap Peningkatan Mutu Manajemen Sekolah Di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Bandung “.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan gambaran umum mengenai ruang lingkup penelitian. Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini dirumuskan dalam beberapa rumusan masalah berbentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimanakah manajemen anti-korupsi di SMAN 2 Bandung ?
2. Bagaimanakah mutu manajemen sekolah di SMAN 2 Bandung ?
3. Seberapa besar pengaruh manajemen anti-korupsi terhadap peningkatan mutu manajemen sekolah di SMAN 2 Bandung ?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai pengaruh manajemen anti-korupsi terhadap peningkatan mutu manajemen sekolah di SMAN 2 Bandung.

2. Tujuan Khusus

- a. Mendeskripsikan implementasi manajemen anti-korupsi dalam penyelenggaraan sekolah, yang akan menjelaskan dan menguraikan sejauhmana penyelenggaraan sekolah dapat dilihat dari 1) transparansi, 2) partisipasi, dan 3) akuntabilitas.
- b. Menganalisis peran personil sekolah dalam penyelenggaraan manajemen anti-korupsi, khususnya dilihat dari transparansi, partisipasi dan akuntabilitas.
- c. Untuk Memperoleh gambaran tentang pelaksanaan manajemen sekolah.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian mengenai pengaruh manajemen anti-korupsi terhadap peningkatan mutu manajemen sekolah di SMAN 2 Bandung diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teori maupun praktik. Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Segi Teori

Dari segi teori diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi yang *up to date* dalam kajian manajemen anti-korupsi.

2. Segi Praktis

- a. Hasil penelitian ini dapat dijadikan oleh kepala sekolah atau pengelola sekolah terkait sebagai informasi atau bahan pertimbangan untuk membuat keputusan atau perencanaan strategis manajemen sekolah yang bebas dari korupsi.
- b. Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan kepada sekolah untuk terus meningkatkan mutu manajemen sekolah, sehingga eksistensi lembaga bisa terus terjaga.

E. Anggapan Dasar

1. Anggapan Dasar

Suharsimi Arikunto (1998: 22) mengemukakan bahwa "Anggapan dasar adalah sesuatu yang diyakini kebenarannya oleh peneliti yang akan berfungsi sebagai hal-hal yang dipakai untuk tempat berpijak bagi peneliti dalam melaksanakan penelitiannya" Adapun anggapan dasar dari penelitian ini adalah :

- a. Pendidikan dipandang sebagai penentu keberhasilan seseorang baik secara sosial ataupun ekonomis, pendidikan merupakan investasi berupa kemampuan, kecakapan, dan keterampilan.

Anggapan dasar ini didukung atas dasar sumber daya manusia sebagai unsur modal.

- b. Dengan manajemen anti-korupsi sekolah akan dapat meningkatkan mutu manajemen sekolahnya.

F. Hipotesis

1. Hipotesis

Sebagaimana yang dikemukakan Suharsimi Arikunto (1998: 22)

”Hipotesis adalah kebenaran sementara yang ditentukan oleh peneliti, tetapi masih harus dibuktikan atau dites atau diuji kebenarannya”.

Adapun hipotesis dari penelitian ini adalah : Terdapat pengaruh positif antara manajemen anti korupsi dengan kualitas penyelenggaraan pendidikan secara signifikan.

Pengaruh tersebut dapat digambarkan dalam bagan berikut ini :



Gambar 1. 2 Skema Hipotesis Penelitian

Keterangan :

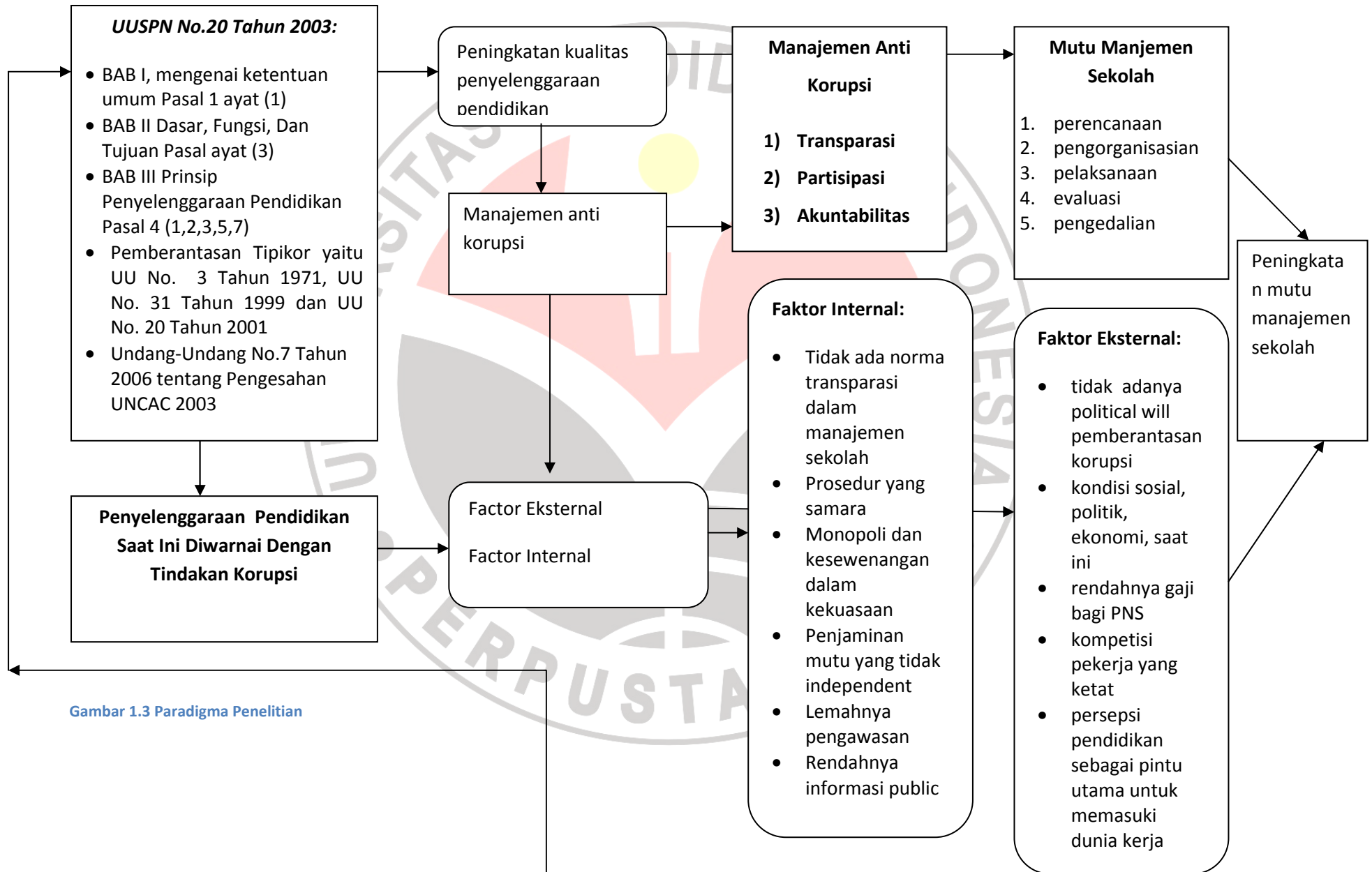
Variabel X : **Manajemen Anti Korupsi**

Variabel Y : **Mutu Manajmemen Sekolah**

➡ : Menunjukkan pengaruh antar kedua variabel

G. Paradigma Penelitian

Paradigma penelitian merupakan alur berpikir dalam melakukan penelitian yang dijadikan acuan untuk pola berpikir peneliti terhadap objek yang akan dituju. Paradigma penelitian adalah hal yang sangat penting untuk mengarahkan konsep berpikir penelitian sehingga penelitian dapat sesuai dengan rumusan dan tujuan penelitian. Paradigma penelitian yang diambil oleh peneliti adalah sebagai berikut:



Gambar 1.3 Paradigma Penelitian

H. Definisi Operasional

Adapun definisi istilah-istilah dalam penelitian ini adalah :

1. Pengaruh

Pengaruh adalah daya yang ada timbul dari sesuatu (benda, orang) yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang. (Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1989: 64).

Beranjak dari pengertian di atas, maka dalam penelitian ini yang dimaksud sebagai pengaruh adalah daya yang ditimbulkan manajemen anti-korupsi terhadap mutu manajemen sekolah di SMAN 2 Bandung.

2. Manajemen Anti Korupsi

Manajemen Anti Korupsi merupakan upaya untuk mencapai tujuan organisasi secara tepat, cepat dan bermutu dan bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme. Upaya ini dilakukan melalui tiga prinsip dasar, yaitu transparansi, partisipasi dan akuntabilitas.

3. Mutu

Mutu adalah *conformance to requirement*, yaitu sesuai dengan yang disyaratkan atau distandarkan. Berdasarkan pengertian di atas yang dimaksud dengan mutu dalam penelitian ini adalah kualitas layanan pembelajaran sesuai dengan syarat yang sudah ditentukan. Perkuliahan Yoyon B. *Manajemen Mutu Terpadu*. Menyatakan :

Fitness for use, as judged by the user. The difficulty in defining quality is to translate future needs of the uses into measurable characteristic, so that a product can be designed and turned out to give satisfaction at a price than the user will pay.

Menurut Drs. Yoyon B. Irianto Mutu adalah “paduan sifat-sifat suatu barang atau jasa yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan pelanggan”.

Menurut A. Widjaya Mutu adalah “kesesuaian/ kecocokan dengan spesifikasi dan standar yang berlaku yang pas untuk digunakan dan dapat memuaskan keinginan, kebutuhan, dan pengharapan pelanggan dengan biaya yang kompetitif”.

Peristilahan yang menjadi kunci dari kedua definisi mutu tersebut adalah :

1. Kesesuaian/ kecocokan
 2. Standar
 3. Memuaskan
 4. Palanggan
 5. Produk dan jasa
4. Manajemen Sekolah

Manajemen sekolah dalam konteks manajemen sekolah merupakan upaya memberdayakan sumber daya sekolah yang dimiliki oleh sekolah melalui perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi supaya tujuan sekolah dapat tercapai secara efektif dan efisien.

I. Metode Dan Teknik Penelitian

1. Metode Penelitian

Penelitian memerlukan suatu metode untuk menentukan keberhasilan dalam mencapai tujuan penelitian. Metode penelitian merupakan unit kerja. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Sukardi (2003:17) bahwa “Metode penelitian sebagai kegiatan yang

secara sistematis, direncanakan oleh para peneliti untuk memecahkan permasalahan yang hidup dan berguna bagi masyarakat, maupun bagi peneliti itu sendiri”.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis yang melihat hubungan antara dua variabel. Dalam pelaksanaannya metode ini menekankan pada studi untuk memperoleh informasi mengenai status gejala pada saat penelitian dilakukan.

Menurut Winarno Surachmad (1982: 140) mengemukakan ciri-ciri dari metode deskriptif, sebagai berikut:

Ciri-ciri dari metode deskriptif dirumuskan sebagai berikut:

- a. Memusatkan pada pemecahan masalah-masalah yang sedang terjadi pada masa sekarang, pada masalah-masalah yang sedang actual.
- b. Data yang dikumpulkan mula-mula disusun dan kemudian dianalisa (karena itu metode ini sering disebut metode analisis).

Berdasarkan hal di atas, peneliti menggunakan metode deskriptif dengan rancangan penelitian berupa studi korelasi, yaitu untuk mengetahui hubungan atau pengaruh kedua variabel yang akan diteliti, dan pendekatan yang digunakan ialah pendekatan kuantitatif.

2. Teknik Penelitian

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian. Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa angket atau kuesioner.

J. Populasi, Sampel dan Lokasi Penelitian

1. Populasi Penelitian

Populasi penelitian adalah keseluruhan sumber data atau objek penelitian, dimana data diperoleh dan untuk ruang lingkup mana hasil penelitian diberlakukan.

Adapun yang dijadikan populasi dalam penelitian ini adalah seluruh guru yang berada di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Bandung.

2. Sampel Penelitian

Sampel merupakan bagian dari populasi yang dianggap mewakili keseluruhan dari populasi itu, sebagaimana yang dikemukakan Dr. Akdon, M.Pd (2005: 32) bahwa :
“Sampel itu contoh, monster, representant atau wakil dari suatu populasi yang cukup besar jumlahnya atau satu bagian dari keseluruhan yang dipilih dan representatif sifatnya.”

Berdasarkan pendapat di atas, maka untuk menentukan sampel dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik sampling total. Jadi seluruh guru di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Bandung dijadikan sebagai sampel penelitian, atau dengan kata lain sebagai penelitian populasi.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat yang digunakan peneliti dalam melaksanakan penelitian. Lokasi penelitian merupakan objek yang dianggap peneliti sebagai tempat masalah yang akan dikaji. Lokasi yang diambil oleh peneliti yaitu Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Bandung.